



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Kompas

Otak-atik Jurus Jitu Atasi Masalah Sampah Jakarta

JAKARTA, KOMPAS — Permasalahan sampah seakan menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung tuntas. Pemerintah terus mencari cara agar timbunan sampah di Jakarta bisa berkurang.

Hal itu mengemuka saat Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq berkunjung ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, Minggu (27/10/2024). Dalam kunjungan itu, Hanif melihat pengoperasian pembangkit listrik tenaga sampah dan pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif atau *refuse derived fuel (RDF) plant*.

Ia menyebutkan, penumpukan sampah di Bantargebang harus segera diselesaikan segera. Masalah yang muncul saat ini adalah kurang optimalnya penyerapan sampah di hulu. "Jumlah sampah yang terkelola langsung dari sumber hanya sekitar 1.000 ton per hari. Jumlah sampah yang tak terkelola dan akhirnya menumpuk di Bantargebang mencapai 7.500 ton per hari," katanya.

Apalagi timbunan sampah di TPST ini mencapai 55 juta ton dengan ketinggian 40 meter. "Sampah di Bantargebang ini sudah *melok-melok* (terpampang jelas oleh mata). Padahal, Jakarta merupakan tempat tinggal bagi pejabat yang memiliki wewenang untuk mengatur negara. Seharusnya masalah ini bisa diselesaikan," ujar Hanif.

Permasalahan sampah menjadi perhatian karena saat ini Indonesia tengah didera isu impor sampah dari negara maju. "Mereka (negara maju) mengirim sampah ke Indonesia untuk merealisasikan program *zero waste*. Padahal,

potensi sampah di Indonesia masih banyak yang belum terkelola," kata Hanif.

Karena itu, dibutuhkan peran semua pihak, terutama masyarakat, untuk bisa mengelola sampah mulai dari rumah. "Sebab, 49 persen sampah yang ada di Jakarta adalah sampah makanan yang sebenarnya bisa dikelola di tingkat rumah tangga atau bidang usaha," tambahnya.

Sejumlah strategi yang dicetuskan oleh Jakarta diharapkan dapat ditingkatkan skalanya sehingga dampaknya bisa terasa. "Jika strategi yang diterapkan di Jakarta berhasil, tentu akan dijalankan di 12 TPST yang menjadi prioritas di Indonesia," ujar Hanif.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengatakan, sumber sampah di Jakarta tidak hanya dari rumah tangga, tetapi juga dari bidang usaha, seperti UMKM, perhotelan, dan apartemen.

Beragam upaya sudah dijalankan, seperti membangun *RDF plant* di Bantargebang dengan kapasitas 2.000 ton sampah yang bisa menghasilkan 700 ton RDF per hari. *RDF Plant* Rorotan di Jakarta Utara berkapasitas 2.500 ton dan menghasilkan 875 ton RDF per hari.

Apalagi saat ini kebutuhan RDF cukup tinggi. Dua *RDF plant* yang ada saat ini saja belum mencukupi kebutuhan. Seperti diketahui, RDF yang dihasilkan dari sampah Jakarta diserap langsung oleh Indocement. "Sementara kebutuhan RDF mereka sekitar 3.500 ton per hari. Ini tentu kesempatan sekaligus tantangan," kata Joko.

Strategi lain adalah dicevuskannya pulau sampah yang saat ini masih dalam kajian.

Pembuatan pulau sampah ini meniru apa yang telah dilakukan oleh Singapura. "Memang sekarang masih dalam kajian, terutama terkait dampak lingkungan. Namun, diharapkan proyek ini dapat berstatus proyek strategis nasional sehingga diprioritaskan," katanya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto menuturkan, pengolahan sampah di DKI Jakarta sudah mencakup di segala lini. Mulai dari hulu juga terus digencarkan. Saat ini sudah ada 2.400 bank sampah dengan 159.000 nasabah. Pemerintah juga terus membangun ekosistem 342 ternak *maggot* untuk mengurangi pembuangan sampah makanan.

Pemerintah membangun tempat pengelolaan sampah *reduce, reuse, recycle (TPS3R)* di beberapa tempat. Di tempat itu juga terdapat mesin pemilahan dan pencacahan sehingga semua sampah bisa terkelola.

Pengelolaan sampah di bantaran kali juga telah dilakukan. Hal ini terlihat pada saringan sampah Ciliwung yang berada di TB Simatupang. Di sana, sampah yang mengalir di Sungai Ciliwung akan disaring, kemudian diangkut dan diolah menjadi RDF dan pupuk kompos. "Kebanyakan sampah yang dikelola adalah ranting dan juga sampah rumah tangga. Dengan cara ini, diharapkan sampah di sungai tidak lagi menumpuk," kata Asep.

Namun, semua program pemerintah ini hanya bisa berjalan dengan peran dari semua pihak, mulai dari warga, pengusaha, hingga pemangku kepentingan terkait.

(RAM)